

DPMPTSP
KABUPATEN BLITAR

RENJA 2020



dpmptsp@blitarkab.go.id



(0342-801665)

KATA PENGANTAR

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut yang menjadi dasar penyusunan APBN adalah RKP. Sedangkan dasar penyusunan APBD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun atas dasar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Guna memenuhi kewajiban tersebut dan dalam rangka melaksanakan salah satu fungsi manajemen pemerintahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik maka perlu kiranya disusun suatu Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar untuk Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dan evaluasi pada program/kegiatan tahun anggaran 2018. Dengan disusunnya Renja-PD tersebut maka dapat diketahui secara pasti arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun atas dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini, diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman bagi segenap personil yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengemban tugasnya dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan di bidang perijinan dan penanaman modal kepada masyarakat di Kabupaten Blitar sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi yang telah ditetapkan.

Blitar, Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Tingkat I

NIP. 19750902 199412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Laludan Capaian Renstra PD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...	19
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD.....	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	38
3.3. Program dan Kegiatan	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH	44
BAB IV PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja PD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja PD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja PD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja PD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja PD dimulai dengan persiapan evaluasi pada Renja PD dengan menganalisa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Menganalisis gambaran pelayanan PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan lebih efektif dalam penyerapan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja PD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masingPD;
- c. Penyusunan Renja PD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunanAPBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja PD didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif PD;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra PD dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2017 tentang sebagian Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan Non Perizinan dari Bupati Blitar Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 28 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2020 adalah untuk menghasilkan acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan PD setelah adanya anggaran kegiatan, serta menggambarkan target capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja PD dan Rencana Kerja Anggaran PD. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah:

1. Mendeskripsikan tentang program – program dan kegiatan yang berubah atau bergeser oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar beserta pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara Rencana Kerja yang ada pada PD dengan visi misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar;
3. Menjamin terciptanya pemanfaatan seluruh sumberdaya yang ada pada PD secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
4. Sebagai panduan dan pedoman bagi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirumuskan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 melaksanakan 8 (delapan) program. Dari 8 (delapan) program tersebut semua program memenuhi target. Secara rinci realisasi program memenuhi target kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan target kinerja program 96% capaian kinerja program 100% (melebihi target).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja program 98% capain kinerja program 98% (memenuhi target).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan target kinerja program 96% capaian kinerja program 100% (melebihi target).
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja; Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan, dengan target kinerja program 70% capaian kinerja program 100% (melebihi target).
5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Imelalui Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan I; Validasi Perijinan I; Fasilitasi Penerbitan Perijinan I, dengan target kinerja program 97% capaian kinerja program 100% (melebihi target).

6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II melalui Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan II; Validasi Perijinan II; Fasilitasi Penerbitan Perijinan II, dengan target kinerja program 97% capaian kinerja program 100% (melebihi target).
7. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal melalui Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Investasi; Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal; Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal, dengan target kinerja program 76% capaian kinerja program 78% (melebihi target).
8. Program Peningkatan Promosi dan sistem Informasi melalui Kegiatan Pengelolaan Pendataan Potensi Daerah, Investasi dan Perijinan; Fasilitasi Promosi Investasi Daerah; Penerapan Sistem Teknologi Informasi Investasi Daerah, dengan target kinerja program 72% capaian kinerja program 176,1% (melebihi target).

Untuk lebih jelasnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Kabupaten Blitar

Nama SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar											
2	12	Bidang Urusan Penanaman Modal										
2	12	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase kepuasan aparatur	99%	1 tahun	98%	88,56%	93,22%	96%	100%	101,01%
2	12	01	20	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	jumlah jenis layanan administrasi perkantoran	10	1 tahun	96%	88,56%	93,22%	10	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	99%	1 tahun	98%	97,98%	99,98%	98%	98%	98,99%
2	12	02	45	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	jumlah sarpras yang berfungsi baik	60	1 tahun	98%	97,98%	99,98%	60	558	515%
2	12	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	97%	1 unit kerja	25 orang	93,99%	100%	96%	100%	103,09%
2	12	05	04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas;jumlah peserta capacity building	48;124	1 unit kerja	99%	81,70%	100%	12;31	12;72	41,53%
2	12	06		Program Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Capaian Kinerja dan	persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	100%	12 bulan	2 dok	81,70%	81,70%	70%	100%	103,09%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	Keuangan											
2	12	06	15	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	4	-	-	-	4	4	100%
2	12	06	16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan	2	-	-	-	2	2	100%
2	12	15		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I	persentase pelayanan perijinan bidang I tepat waktu	98%	-	-	-	97%	100%	102,04%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	12	15	01	Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan I	jumlah usaha yg disurvei/ditinjau pada perijinan I; jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi perijinan I; jumlah peserta sosialisasi perijinan I; jumlah paket pengembangan aplikasi pendataan	2160;50;150;1	-	-	-	500;30;150;1	310;32;150;1	69,59%
2	12	15	04	Kegiatan Validasi Perijinan I	jumlah perijinan yang tervalidasi pada perijinan I; jumlah pelayanan konektivitas dan pengembangan perijinan di kab. Blitar	2000;22	-	-	-	500;22	808;22	70,20%
2	12	15	05	Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan I	jumlah usaha yang di monev pada perijinan I	50	-	-	-	50	28	56%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	12	16		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II	persentase pelayanan perijinan bidang II tepat waktu	98%	-	-	-	97%	100%	102,04%
2	12	16	01	Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan II	jumlah usaha yg disurvey/ditinjau pada perijinan II;jumlah laporan hasil koordinasi/konsultasi perijinan II;jumlah peserta sosialisasi perijinan II;jumlah SOP pelayanan perijinan	2160;150;150;1	-	-	-	500;30;150;1	643;48;150;1	65,44%
2	12	16	04	Kegiatan Validasi Perijinan II	jumlah perijinan yang tervalidasi pada perijinan II;jumlah dokumen IKM pada perijinan II	2000;4	-	-	-	500;1	672;1	29,30%
2	12	16	05	Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan II	jumlah usaha yang di monev pada perijinan II	50	-	-	-	59	59	118%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
2	12	18		Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	prosentase nilai investasi	80%	-	80%	75,68%	-	72%	176,1%	220,13%
2	12	18	01	Kegiatan Pengelolaan Pendataan Potensi Daerah, Investasi dan Perijinan	jumlah dokumen laporan pendataan potensi daerah, investasi dan perijinan	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	12	18	02	Kegiatan Fasilitasi Promosi Investasi Daerah	jumlah pameran dan promosi investasi	5;5	-	-	-	-	1;1	3;2	70%
2	12	18	04	Kegiatan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Investasi Daerah	jumlah dokumen laporan peningkatan promosi dan sistem informasi	1	-	-	-	-	1	1	100%
2	12	19		Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	prosentase ijin penanaman modal yang terealisasi	88%	-	88%	99,90%	113,52%	76%	78%	88,64%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2017	Realisasi Renja PD tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
2	12	19	01	Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Investasi	jumlah profil/prospektus investasi	12	-	-	-	6	9	125%
2	12	19	03	Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal	jumlah regulasi yang disusun	1	-	-	-	1	0,6	80%
2	12	19	04	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal	jumlah investor yang mendapatka paket fasilitasi;jumlah usaha yang dimonev terkait pengaduan perijinan;jumlah usaha yang dimonev terkait perkembangan perusahaan	55;20;55	-	-	-	55;20;55	60;28;69	124,86%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun 2018, dapat kami uraikan analisis kinerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar tahun 2018 dimana pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2020. Adapun capaian Indikator Utama pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan dengan target 80, terealisasi 79,35 dengan tingkat capaian 88,16%
2. Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar dengan target 15%, terealisasi 314,16% dengan tingkat capaian 1309%.

Realisasi investasi PMDN dengan modal diatas 500jt Tahun 2018 =
Rp. 1.216.140.105.721,-
Realisasi investasi PMA dengan modal diatas 500jt Tahun 2018 =
Rp. 236.616.921.052,-
Sedangkan Realisasi investasi PMDN dengan modal diatas 500jt Tahun 2017=
Rp. 350.774.500.000,-
Dan di tahun 2017, Realisasi investasi PMA dengan modal diatas 500jt tidak ada.

Menggunakan Formulasi sebagai berikut:

Realisasi Investasi Tahun		1.452.757.026.773 -			
2018 – Realisasi Investasi		350.774.500.000			
Tahun 2017	X 100% =	350.774.500.000	X 100%		= 314,16%
Realisasi Investasi Tahun		350.774.500.000			
2017					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam Melaksanakan tugas dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengevaluasi realisasi kinerja tahun lalu. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	90	79,35	88,16%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Presentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	24%	314,16%	1308%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah tercapai tingkat kemajuan rata-rata tahun 2018 adalah sebesar 698,58%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target pada awal target Renstra **baik**.

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada Tahun 2018 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kevalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
2. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena factor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran money;

3. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi Kabupaten Blitar mengingat Bidang yang terkait baru terbentuk pada tahun 2018.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIPISE sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
2. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
3. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulan minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Blitar melalui perijinan.

Selain isu-isu penting di atas ada banyak hal yang mempengaruhi penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD yaitu dengan adanya beberapa strategi dan kebijakan PD agar tujuan yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai tentunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah menyiapkan beberapa langkah-langkah strategi, yang akan dilaksanakan antara lain :

- Memberikan kemudahan investasi pada investor melalui pelayanan yang optimal dan SDM aparatur yang berkualitas;
- Menciptakan kondisi iklim usaha yang aman dengan pelayanan pengaduan yang baik;
- Menciptakan produk inovasi penanaman modal dan perizinan dengan didukung pelayanan secara elektronik dan berbasis teknologi informasi.

Kebijakan yang disusun dalam rangka menunjang strategi diantaranya adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan promosi dan peluang potensi investasi daerah;
- Melakukan inventarisasi dan kelengkapan regulasi perizinan dan kebijakan penanaman modal sebagai payung hukum dalam memberikan pelayanan yang prima;
- Melakukan peningkatan dan pengembangan software aplikasi perizinan dan penanaman modal dalam rangka penguatan pelayanan berbasis IT.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sesuai RPJMD

Visi : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing			
Misi ke 1 : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran	1. Strategi 1.1 : Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja	1. Arah Kebijakan 1.1 : Peningkatan investasi dan fasilitasi kesempatan berusaha
Misi ke 5 : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	1. Sasaran 1.1 : Meningkatnya pelayanan perijinan	1. Strategi 1.1 : Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan	1. Arah Kebijakan 1.1 : Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan perijinan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan visi tersebut. Visi Kabupaten Blitar periode tahun 2016- 2021 yaitu:

“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”

Penjelasan dari visi Kabupaten Blitar adalah, Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya saing, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan Internasional.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengetasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religious), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Visi dan Misi Kabupaten Blitar periode 2016-2021, dirumuskan dan dijabarkan

ke dalam beberapa program aksi sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Berikut ini merupakan penjabaran misi dari pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:

Misi I: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengetasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Tujuan dari misi ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kestabilan ketersediaan pangan;
2. Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni;
3. Subsidi dan bantuan untuk masyarakat miskin, termasuk disabilitas(cacat);
4. Perluasan kesempatan kerja serta pembinaan untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan;
5. Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang.

Misi II: Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religious), kearifan lokal, dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari misi ini adalah penciptaan susasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas kegiatan keagamaan masyarakat;
2. Meningkatkan komunikasi serta memantapkan keharmonisan anatar umat beragama;
3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat agar mampu mengantisipasi ancaman dan gangguan kamtibmas;
4. Memberdayakan kearifan lokal untuk menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis;
5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan menciptakan ketertiban dan keamanan.

Misi III: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar, meningkatkan kualitas pendidikan yang religius, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan serta pelayanan kesehatan yang memadai. Program Aksi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan potensi tenaga pendidik dan pendidikan;
2. Pelaksanaan pendidikan berbasis pengembangan karakter (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, dan praktek keagamaan);
3. Penantaan manajemen pendidikan yang professional dan efisien dengan menggunakan sistem database pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis IT;
4. Peningkatan akses atas pendidikan dan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, baik formal maupun non formal, termasuk yang berkebutugan khusus (disabilitas) serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
5. Peningkatan kualitas/komperensi dan kualitas tenaga kesehatan;
6. Peningkatan akses atas kesehatan yang memadai serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan(kesehatan dasar dan rujukan);
7. Peningkatan peranserta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hidup bersih dan sehat.

Misi IV: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Tujuan misi ini adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan public yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat dan mengembangkan manajemen pemerintan daerah berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan

pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penataan serta peningkatan peran kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Memaksimalkan fungsi dan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah melalui penerapan prinsip “the right man on the right place”
4. Pengembangan sistem manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, dan profesionalisme;
6. Penetapan pelaksanaan sistem dan prosedur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah melalui perencanaan dan penganggaran terpadu;
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Misi V: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan misi ini adalah Meningkatkan keberdayaan masyarakat sehingga mampu mandiri dan memiliki daya saing, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Kabupaten Blitar menuju persaingan global, mendorong pengembangan standarisasi produk barang dan jasa untuk meningkatkan daya saing, menumbuhkembangkan dan meningkatkan daya saing sektor pertanian, koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (KUMKM) yang ada di Kabupaten Blitar, mengembangkannya ekonomi kreatif, menumbuhkembangkan jiwa wirausaha, penguatan sektor pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal Kabupaten Blitar, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan berkelanjutan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha;
2. Penyediaan tenaga kerja terampil dan professional melalui penyetaraan kualitas standar kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar sertifikasi internasional dalam era global;
3. Pengembangan iklim usaha secara sehat serta melindungi konsumen;
4. Pengembangan sektor pertanian, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing;
5. Mengembangkan pariwisata daerah yang berbasis pada seni dan budaya lokal serta potensi sumber daya alam;
6. Pengembangan ekonomi kreatif yang sesuai dengan potensi lokal untuk menunjang kepariwisataan daerah;
7. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Misi VI: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan misi ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan kuantitas aparatur desa dan kelembagaan masyarakat desa, meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan, baik fisik maupun non fisik yang berbasis pendekatan desa dan kawaasan pedesaan, mengembangkan peran aktif lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif. Program Aksi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
2. Penyusunan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan yang berorientasi

- pada kesejahteraan masyarakat untuk meminimalisasi disparitas antar wilayah;
4. Fasilitas pengembangan manajemen pemerintahan desa didukung dengan sistem informasi desa;
 5. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa sebagai bentuk nyata partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Dari 6 (enam) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu pintu kabupaten blitar adalah

Misi yang ke 1 (satu), yaitu **“Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat”** melalui program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran, adapun Sasaran yaitu **Menurunnya Angka Kemiskinan** dengan Indikator Kinerja Sasaran : Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar.

Misi yang ke 5 (lima), yaitu **“Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing”** dengan tujuan Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan memperhatikan daya dukung lingkungan, adapun Sasaran yaitu **Meningkatnya Pelayanan Perijinan** dengan Indikator Kinerja Sasaran : Predikat IKM layanan Perijinan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Blitar 2020

Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2020 adalah “Memacu Pembangunan Ekonomi yang Mengoptimalkan Sumber Daya secara Arif dan Lestari”. Dengan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blitar tahun 2020 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan kemiskinan dan pengangguran
2. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur
3. Terwujudnya stabilitas wilayah
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat
6. Meningkatnya kualitas kehidupan social masyarakat yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak
7. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
8. Meningkatnya kualitas pelayanan public

9. Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, dan usaha mikro berbasis pertanian dan pariwisata
10. Meningkatnya pelayanan perijinan
11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan
12. Meningkatnya kualitas pembangunan desa

Dengan demikian untuk memenuhi prasyarat pembangunan dan sistem perencanaan pengendalian perlulah dibuat sebuah nomenklatur untuk mempermudah dalam pelaksanaan musrenbang maupun dalam sistem informasi perencanaan daerah. Maka dapat ditentukan bahwa prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 ialah:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Penataan kota kanigoro, pemeliharaan infrastruktur penopang perekonomian dan pengelolaan sumberdaya air;
3. Pemantapan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam Melaksanakan pesta demokrasi;
4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan masyarakat serta pengarusutamaan gender dan anak;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, kinerja ASN dan peningkatan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi; serta
6. Peningkatan daya saing usaha melalui sector ekonomi unggulan berbasis kawasan dan berkelanjutan.

Berdasarkan 6 prioritas Kabupaten Blitar tahun 2020 yang discadingkan dengan Agenda Prioritas Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 terdapat beberapa agenda prioritas yang linear dan menjadi prioritas pendukung. Secara keseluruhan dalam 5 tahun Kabupaten Blitar memiliki 6 agenda prioritas yang dilaksanakan selama periode 5 tahun dan terbagi-bagi sesuai dengan perencanaan pembangunan tiap tahunnya, yaitu:

1. Agenda penataan perkantoran kanigoro
2. Penanggulangan dan pengentasan kemiskinan
3. Pengembangan pariwisata dan kawasan perdesaan
4. Pengembangan dan pengolahan produk pertanian
5. Pengembangan daya saing UMKM
6. Peningkatan akses pelayanan kesehatan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2020 dan Renstra SKPD, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mengajukan 8 program yang terdiri dari

17 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel mengenai hasil evaluasi atas dokumen RKPD yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Blitar:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Blitar

SKPD: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

lembar 30 dari 46

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Persentase kepuasan aparatur	98%	Rp 663.688.335	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Persentase kepuasan aparatur	98%	Rp 663.688.335	
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Jumlah jenis layanan administrasi administrasi perkantoran	10 jenis layanan	Rp 663.688.335	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	DPMPTSP	Jumlah jenis layanan administrasi administrasi perkantoran	10 jenis layanan	Rp 663.688.335	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	99%	Rp 646.174.524	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	DPMPTSP	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	99%	Rp 646.174.524	
	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTSP	Jumlah sarpras yg berfungsi baik	595 buah	Rp 646.174.524	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana	DPMPTSP	Jumlah sarpras yg berfungsi baik	595 buah	Rp 646.174.524	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	97%	Rp 571.322.854	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	97%	Rp 571.322.854	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP	Jumlah aparatur yg mengikuti peningkatan SDA;Jumlah peserta capacity building	4 aparatur;28 peserta	Rp 571.322.854	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	DPMPTSP	Jumlah aparatur yg mengikuti peningkatan SDA;Jumlah peserta capacity building	4 aparatur;28 peserta	Rp 571.322.854	
4	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPMPTSP	Prosentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	90%	Rp 55.839.700	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DPMPTSP	Prosentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	90%	Rp 55.839.700	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	4 dokumen	Rp 45.839.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	4 dokumen	Rp 45.839.700	
	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	DPMPTSP	Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan	2 dokumen	Rp 10.000.000	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	DPMPTSP	Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan	2 dokumen	Rp 10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	KABUPATEN BLITAR	Prosentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu	98%	Rp 791.062.413	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	KABUPATEN BLITAR	Prosentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu	98%	Rp 791.062.413	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	KABUPATEN BLITAR	Jumlah pengembangan aplikasi perizinan;Jumlah pelaku usaha yang terlayani izin usaha	1 aplikasi;1500 pelaku usaha	Rp 200.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	KABUPATEN BLITAR	Jumlah pengembangan aplikasi perizinan;Jumlah pelaku usaha yang terlayani izin usaha	1 aplikasi;1500 pelaku usaha	Rp 200.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	KABUPATEN BLITAR	Jumlah verifikasi komitmen pada perizinan;Jumlah kecamatan pendamping OSS (Canting OSS)	1500 izin;22 kecamatan	Rp 200.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	KABUPATEN BLITAR	Jumlah verifikasi komitmen pada perizinan;Jumlah kecamatan pendamping OSS (Canting OSS)	1500 izin;22 kecamatan	Rp 200.000.000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	KABUPATEN BLITAR	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	1500 izin	Rp 391.062.413	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	KABUPATEN BLITAR	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	1500 izin	Rp 391.062.413	
6	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	KABUPATEN BLITAR	Prosentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu	98%	Rp 820.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	KABUPATEN BLITAR	Prosentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu	98%	Rp 820.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan;Jumlah jenis layanan informasi perizinan	2 laporan ;2 jenis layanan	Rp 200.000.000	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan;Jumlah jenis layanan informasi perizinan	2 laporan ;2 jenis layanan	Rp 200.000.000	
	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasi	2 regulasi	Rp 300.000.000	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasi	2 regulasi	Rp 300.000.000	
	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah dokumen laporan perizinan;Jumlah regulasi perizinan yang disusun;Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 dokumen; 1 regulasi (perbup);2 dokumen IKM	Rp 320.000.000	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	KABUPATEN BLITAR	Jumlah dokumen laporan perizinan;Jumlah regulasi perizinan yang disusun;Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4 dokumen;1 regulasi (perbup);2 dokumen IKM	Rp 320.000.000	
7	Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Prosentase ijin penanaman modal yang terealisasi	84%	Rp 480.841.859	Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Prosentase ijin penanaman modal yang terealisasi	84%	Rp 480.841.859	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah perusahaan sasaran monev dengan modal > 500jt ;Jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;Jumlah pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60 perusahaan;12 kali ;2 kali	Rp 150.841.859	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah perusahaan sasaran monev dengan modal > 500jt ;Jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;Jumlah pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	60 perusahaan ;12 kali ;2 kali	Rp 150.841.859	
	Pembinaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun; Jumlah peserta bimtek terkait LKPM;Jumlah sosialisasi dan pembinaan penanaman modal	1 regulasi (perbup);150 peserta;2 kali sosialisasi	Rp 180.000.000	Pembinaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun; Jumlah peserta bimtek terkait LKPM;Jumlah sosialisasi dan pembinaan penanaman modal	1 regulasi (perbup);150 peserta;2 kali sosialisasi	Rp 180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah pengembangan aplikasi pendataan penanaman modal;Jumlah laporan updating data investasi penanaman modal;Jumlah buku profil penanaman modal	1 aplikasi;4 laporan ;1 buku	Rp 150.000.000	Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah pengembangan aplikasi pendataan penanaman modal;Jumlah laporan updating data investasi penanaman modal;Jumlah buku profil penanaman modal	1 aplikasi;4 laporan ;1 buku	Rp 150.000.000	
8	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	KABUPATEN BLITAR	Prosentase nilai investasi	76%	Rp 1.170.320.977	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	KABUPATEN BLITAR	Prosentase nilai investasi	76%	Rp 1.170.320.977	
	Perencanaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah peserta rakor perencanaan penanaman modal;Jumlah koordinasi perencanaan penanaman	150 peserta;1 kali	Rp 170.320.977	Perencanaan Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah peserta rakor perencanaan penanaman modal;Jumlah koordinasi perencanaan penanaman	150 peserta;1 kali	Rp 170.320.977	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah penyusunan buku potensi dan peluang investasi;Jumlah peserta gathering penanaman modal	1 buku dan 1 peta potensi investasi daerah;60 peserta	Rp 300.000.000	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah penyusunan buku potensi dan peluang investasi;Jumlah peserta gathering penanaman modal	1 buku dan 1 peta potensi investasi daerah;60 peserta	Rp 300.000.000	
	Promosi Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal;Jumlah pengembangan website promosi investasi	7 kegiatan promosi;1 website	Rp 700.000.000	Promosi Penanaman Modal	KABUPATEN BLITAR	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal;Jumlah pengembangan website promosi investasi	7 kegiatan promosi;1 website	Rp 700.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Namun, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Renja harus menelaah kebijakan dan program prioritas Nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Karenanya pada bab ini tertuang hasil telaah kebijakan dan program pembangunan nasional yang melekat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Kebijakan dan program prioritas nasional dimaksud dirujuk dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013

Berdasar hasil telaah dan sinkronisasi 11 prioritas pembangunan nasional terdapat beberapa program kegiatan yang melekat sebagai penunjang pada program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Blitar, diantaranya terkait dengan birokrasi dan tata kelola, iklim investasi dan iklim usaha serta Inovasi teknologi sebagai penunjang kelancaran pelayanan publik dalam hal perijinan dan penanaman modal di Kabupaten Blitar.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan dari rencana kerja yang disusun awal, diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada pelaksanaan Renja awal, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada.

Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki. Tujuan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pada pelaksanaan Renja awal, mengenai masalah yang dihadapi dalam tahun berjalan dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada. Sedangkan sasaran dari Rencana Kerja DPMPTSP adalah Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Blitar, meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap informasi perizinan serta mengintensifkan Penanganan Pengaduan masyarakat.

3.3 Program Dan Kegiatan

a. Rumusan Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan didasarkan pada kesesuaian sasaran RPJMD dan tujuan PD serta efisiensi atas dasar evaluasi program/kegiatan yang berjalan pada Renja awal. Dalam Misi V RPJMD menitikberatkan pada Peningkatan Pelayanan Perijinan yang ditunjang oleh tujuan PD yaitu mewujudkan pelayanan perijinan dan investasi. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yaitu sebagai unit pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan serta penanaman modal

b. Untuk tahun anggaran 2020, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar ada perubahan SOTK baru, DPMPTSP merencanakan 8 (delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan usulan pagu anggaran sebesar Rp. 8.835.039.120,-(Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) dimana keseluruhan anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Blitar.

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD
Tahun 2020 Kabupaten Blitar**

SKPD: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

lembar 40 dari 46

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.2.12.01.01	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal				5.199.250.662,00				5.520.158.959,00
2.12.2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan aparatur	DPMPTSP	98%	663.688.335,00	APBD KAB		99%	709.641.952,00
2.12.2.12.01.01.01.01	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis layanan administrasi administrasi perkantoran	DPMPTSP	10 jenis layanan	663.688.335,00	APBD KAB		10 jenis layanan	709.641.952,00
2.12.2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	DPMPTSP	99%	646.174.524,00	APBD KAB		99%	690.915.488,00
2.12.2.12.01.01.02.01	Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarpras yg berfungsi baik	DPMPTSP	595 buah	646.174.524,00	APBD KAB		600 buah	690.915.488,00
2.12.2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur	DPMPTSP	97%	571.322.854,00	APBD KAB		97%	610.881.107,00
2.12.2.12.01.01.05.01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yg mengikuti peningkatan SDA;Jumlah peserta capacity building	DPMPTSP	4 aparatur;28 peserta	571.322.854,00	APBD KAB		4 aparatur;28 peserta	610.881.107,00
2.12.2.12.01.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran,	Prosentase dokumen perencanaan , laporan	DPMPTSP	90%	55.839.700,00	APBD KAB		100%	59.706.027,00

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
	Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu							
2.12.2.12.01.01.06.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	DPMPTSP	4 dokumen	45.839.700,00	APBD KAB		4 dokumen	47.706.027,00
2.12.2.12.01.01.06.02	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan	DPMPTSP	2 dokumen	10.000.000,00	APBD KAB		2 dokumen	12.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I	Prosentase pelayanan perijinan Bidang I tepat waktu	KABUPATEN BLITAR	98%	791.062.413,00	APBD KAB		98%	845.835.379,00
2.12.2.12.01.01.16.04	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I	Jumlah pengembangan aplikasi perizinan;Jumlah pelaku usaha yang terlayani izin usaha	KABUPATEN BLITAR	1 aplikasi;1500 pelaku usaha	200.000.000,00	APBD KAB		1 aplikasi;1500 pelaku usaha	210.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16.05	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II	Jumlah verifikasi komitmen pada perizinan;Jumlah kecamatan pendamping OSS (Canting OSS)	KABUPATEN BLITAR	1500 izin;22 kecamatan	200.000.000,00	APBD KAB		1500 izin;22 kecamatan	210.000.000,00
2.12.2.12.01.01.16.06	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	KABUPATEN BLITAR	1500 izin	391.062.413,00	APBD KAB		1500 izin	425.835.379,00
2.12.2.12.01.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II	Prosentase pelayanan perijinan II yang tepat waktu	KABUPATEN BLITAR	98%	820.000.000,00	APBD KAB		98%	850.000.000,00
2.12.2.12.01.01.17.04	Fasilitasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan pengaduan perizinan dan non perizinan;Jumlah jenis layanan informasi	KABUPATEN BLITAR	2 laporan ; 2 jenis layanan	200.000.000,00	APBD KAB			210.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		perizinan							
2.12.2.12.01.01.17.05	Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Jumlah regulasi perizinan yang tersosialisasi	KABUPATEN BLITAR	2 regulasi	300.000.000,00	APBD KAB		2 regulasi	310.000.000,00
2.12.2.12.01.01.17.06	Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Jumlah dokumen laporan perizinan;Jumlah regulasi perizinan yang disusun;Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	KABUPATEN BLITAR	4 dokumen;1 regulasi (perbup);2 dokumen IKM	320.000.000,00	APBD KAB		4 dokumen;1 regulasi (perbup);2 dokumen IKM	330.000.000,00
2.12.2.12.01.01.18	Program Peningkatan, Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	Prosentase ijin penanaman modal yang terealisasi	KABUPATEN BLITAR	84%	480.841.859,00	APBD KAB		88%	519.135.231,00
2.12.2.12.01.01.18.06	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan sasaran monev dengan modal > 500jt ;Jumlah koordinasi kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;Jumlah pelaksanaan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	KABUPATEN BLITAR	60 perusahaan;12 kali ;2 kali	150.841.859,00	APBD KAB		60 perusahaan;12 kali ;2 kali	164.135.231,00
2.12.2.12.01.01.18.07	Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah regulasi penanaman modal yang disusun;Jumlah peserta bimtek terkait	KABUPATEN BLITAR	1 regulasi (perbup);150 peserta;2 kali sosialisasi	180.000.000,00	APBD KAB		1 regulasi (perbup);150 peserta;2 kali sosialisasi	190.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
		LKPM;Jumlah sosialisasi dan pembinaan penanaman modal							
2.12.2.12.01.01.18.08	Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah pengembangan aplikasi pendataan penanaman modal;Jumlah laporan updating data investasi penanaman modal;Jumlah buku profil penanaman modal	KABUPATEN BLITAR	1 aplikasi;4 laporan ;1 buku	150.000.000,00	APBD KAB		1 aplikasi;4 laporan ;1 buku	165.000.000,00
2.12.2.12.01.01.19	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	Prosentase nilai investasi	KABUPATEN BLITAR	76%	1.170.320.977,00	APBD KAB		80%	1.234.043.775,00
2.12.2.12.01.01.19.06	Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta rakor perencanaan penanaman modal;Jumlah koordinasi perencanaan penanaman	KABUPATEN BLITAR	150 peserta;1 kali	170.320.977,00	APBD KAB		150 peserta;1 kali	172.320.977,00
2.12.2.12.01.01.19.07	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah penyusunan buku potensi dan peluang investasi;Jumlah peserta gathering penanaman modal	KABUPATEN BLITAR	1 buku dan 1 peta potensi investasi daerah;60 peserta	300.000.000,00	APBD KAB		1 buku dan 1 peta potensi investasi daerah;60 peserta	302.000.000,00
2.12.2.12.01.01.19.08	Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal;Jumlah pengembangan website promosi investasi	KABUPATEN BLITAR	7 kegiatan promosi;1 website	700.000.000,00	APBD KAB		7 kegiatan promosi;1 website	759.722.798,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar merencanakan 8 (delapan) program antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1 Kegiatan): (1). Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1 kegiatan): (1). Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan) : (1). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2 Kegiatan) : (1). Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja, (2). Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan I (3 kegiatan) : (1). Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I, (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II, (3). Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan II (3 kegiatan) : (1). Fasilitasi Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan, (2) Fasilitasi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, (3). Pelaporan dan Peningkatan Layanan
7. Program Peningkatan Pengendalian Penanaman Modal (3 Kegiatan): (1). Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, (2). Pembinaan Penanaman Modal, (3). Pengelolaan Pendataan dan Sistem Informasi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi (3 kegiatan) : (1). Perencanaan Penanaman Modal, (2). Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (3). Promosi Penanaman Modal.

Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing – masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), Indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact). Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021. Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Blitar.

BAB V
P E N U T U P

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar untuk tahun 2020 ini maka dapat diketahui secara jelas apa yang menjadi rencana kerja dan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2020 setelah adanya anggaran kegiatan.

Karena Renja SKPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang ada pada tiap-tiap SKPD maka Renja ini sangat terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lainnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Agar program dan kegiatan yang ada pada DPMPTSP dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan serta berkesinambungan maka salah satu upayanya adalah untuk dapat dilakukan pengintegrasian kebijakan maupun program pengembangan DPMPTSP tersebut ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kebijakan maupun program yang ingin dicapai selama kurun waktu lima hingga dua puluh tahun ke depan dapat memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul. Penuangan kebijakan DPMPTSP ke dalam dokumen pembangunan daerah tersebut dimaksudkan antara lain, untuk menjamin ketersediaan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan dan pengelolaan DPMPTSP secara berkelanjutan.

Untuk itu koordinasi dan kerjasama dari semua pihak mutlak sangat diperlukan, guna menjamin kelangsungan dan pengembangan dari DPMPTSP agar tetap eksis dan dapat melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan perijinan bagi masyarakat di Kabupaten Blitar. Dengan demikian diharapkan ke depan iklim investasi dan perekonomian di Kabupaten Blitar dapat meningkat sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi Visi dari Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu “Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”.

Blitar, Mei 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Tingkat I *SP*

NIP. 19750902 199412 1 002